

# TINJAUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT TERHADAP KESIAPAN AKREDITASI SNARS EDISI 1 DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Bayu Santoso<sup>1</sup>, Laili Rahmatul Ilmi<sup>2</sup>  
INTISARI

**Latar Belakang:** Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung tertib administrasi. Kelengkapan pengisian lembar *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis serta berperan dalam penilaian akreditasi rumah sakit terbaru yaitu SNARS Edisi 1. Berdasarkan Studi pendahuluan pada tanggal 11 April 2018 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, diketahui telah melaksanakan *informed consent*. Namun dalam kelengkapan lembar *informed consent* masih terdapat beberapa lembar yang tidak terisi. Dari sampel 20 lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran, ditemukan bahwa 19 (95%) lembar pemberian informasi tidak terisi dan 2 (10%) lembar persetujuan tindakan kedokteran tidak terisi.

**Tujuan Penelitian:** Meninjau pelaksanaan *informed consent* terhadap kesiapan akreditasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

**Metode Penelitian:** Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah semua berkas rekam medis rawat inap kasus bedah di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah lembar *informed consent* rawat inap kasus bedah yang terdiri atas lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan *check-list* kelengkapan lembar *informed consent* dan wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada petugas analisis, dokter, dan manajemen rumah sakit bagian akreditasi (HPK) RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

**Hasil:** Regulasi sudah ada, yaitu SK Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berisi tentang penatalaksanaan *informed consent* dan SPO. Lembar pemberian informasi memiliki rata-rata persentase item lengkap sebesar 76% dan item yang tidak lengkap sebesar 24%, sedangkan Lembar persetujuan tindakan kedokteran memiliki rata-rata persentase item lengkap sebesar 53% dan item yang tidak lengkap sebesar 47%.

**Kesimpulan:** Regulasi terkait *informed consent* sudah ada yaitu SK Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan SPO. Tetapi untuk mengevaluasi pelaksanaan *informed consent*, belum diberlakukan. Kelengkapan lembar pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran masih belum mencapai standar kelengkapan 100% dikarenakan masih ada beberapa item yang tidak terisi atau terlewat dan masih ditemukan beberapa lembar yang kosong.

**Kata Kunci:** Akreditasi, *Informed Consent*, Kelengkapan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**REVIEW OF INFORMED CONSENT IMPLEMENTATION  
ON READINESS OF SNARS ACCREDITATION 1<sup>st</sup> EDITION  
IN PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA HOSPITAL**

**Bayu Santoso<sup>1</sup>, Laili Rahmatul Ilmi<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

**Background:** Every hospital is obliged to hold a medical record to support orderly administration. Completeness of filling out informed consent forms is very important because it can affect the legal aspects of medical records and the quality of medical records and play a role in the latest hospital accreditation assessment, namely SNARS 1<sup>st</sup> edition. Based on the preliminary study on 11 April 2018 at PKU Muhammadiyah Hospital, Yogyakarta, it was known to have informed consent. But in the completeness of the informed consent sheet, there were still several sheets that were not filled. From a sample of 20 information sheets and medical action approval sheets, it was found that 19 (95%) information sheets were not filled out and 2 (10%) approval sheets for medical actions were not filled.

**Objective:** Reviewing the implementation of informed consent on the readiness of accreditation at PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital.

**Method:** Type of research with a qualitative approach. The population of this study was all medical records of inpatient cases of surgery at PKU Muhammadiyah Hospital in Yogyakarta. The sample of this study was an informed consent sheet for inpatient surgical cases consisting of information sheets and medical action approval sheets. Data collection was carried out by observation using the check-list of completeness of the informed consent sheets and interviews using interview guidelines to analysis officers, doctors, and hospital management in the accreditation section of PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital.

**Result:** The regulation already exists, namely SK Director of PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital which contains informed consent management and Standar Operasional Procedure. The information giving sheet has an average percentage of complete items of 76% and incomplete items of 24%, while the Medical Action Approval Sheet has an average percentage of complete items of 53% and incomplete items of 47%.

**Conclusion:** Regulations related to informed consent already exist, namely SK Director PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital and Standard Operating Procedure. But to evaluate the implementation of informed consent, it has not been enacted. The completeness of the information giving sheet and the approval of medical actions still have not reached the 100% completeness standard because there are still some items that are not filled or missed and there are still some blank sheets.

**Keywords:** Accreditation, Informed Consent, Completeness.

---

<sup>1</sup>D-3 Medical Record Student and Health Information General Achmad Yani University, Yogyakarta

<sup>2</sup>Lecturers of General Achmad Yani University, Yogyakarta